

# Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) Pada Yayasan PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) Yogyakarta

Umi Dinurri'annah<sup>1</sup>, Rizqi Anfanni Fahmi<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

---

## INFO ARTIKEL

Received: 16 Agustus 2023  
Accepted: 30 September 2023  
Published: 30 September 2023

Email Penulis:  
umidinurr24573@gmail.com

## ABSTRAK

*Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Namun, hal ini belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nyatanya masih banyak sekali program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak berjalan berkelanjutan secara mandiri, hal ini disebabkan oleh banyak faktor terutama oleh sumber dana yang belum dikelola secara maksimal. Tujuan utama adanya penelitian ini untuk membahas terkait bagaimana Yayasan PDHI mampu memberdayakan masyarakat dengan dana filantropi secara produktif bukan konsumtif atau yang biasa disebut dengan istilah Islamic Social Enterprise (ISE) bagi kebermanfaatan masyarakat yang berkelanjutan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan pihak Yayasan PDHI dan beberapa mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi laporan kegiatan dan program - program di Yayasan PDHI. Waktu pengambilan data dalam penelitian ini yaitu bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Penelitian ini menggunakan teknik interaktif yaitu melalui wawancara dan non interaktif melalui dokumentasi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program - program yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini memberikan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam keberlangsungan program melalui kegiatan ekonomi pada mitra atau lembaga dibawah naungan yayasan melalui sistem otonomi yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan menerapkan prinsip dasar bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI ini harus mengarah pada al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta menerapkan rasa kemaslahatan umat dalam setiap program kegiatannya.*

*Keywords: Islamic Social Enterprise, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, ekonomi*

---

## A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi rasio gini atau ketimpangan belanja, meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, DIY sebenarnya merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 11,7% padahal persentase penduduk nasional sebesar 9,41, ditambah dengan masalah ketimpangan pengeluaran antar

kelompok orang atau dengan pengukuran indeks gini tertinggi. BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, Provinsi DIY tercatat sebagai daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia. Ketimpangan di DIY tercatat sebesar 0,423 poin. Situasi jumlah penduduk miskin dan rasio gini yang tinggi bahkan tertinggi secara nasional, tentu menjadi perhatian bahkan perhatian serius bagi pemerintah DIY dan kabupaten/kota di DIY. Dengan indeks gini ratio yang tinggi, tentunya harus ada solusi kebijakan yang mendasar dan inovatif dari Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat saat ini memiliki sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Bukan hanya dari sisi proses pengelolaannya saja namun banyak hal yang perlu untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem pengelolaan masyarakat yang jauh lebih baik. Saat ini pemberdayaan masyarakat yang justru mengandalkan dana filantropi atau yang biasa disebut dengan dana donasi. Dari berbagai program – program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan hal ini justru membuat masyarakat selalu mengandalkan dana donasi dari jama'ah dan donasi dari orang lain. Akhirnya hal ini berakibat adanya perlombaan atau kompetisi untuk mendapatkan donasi dari masyarakat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat ini perlu memiliki program atau sistem pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan awal adanya sebuah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat membutuhkan notifikasi penerimaan dan untuk menjalankan program – program pemberdayaan itu melalui konsep *Islamic Social Enterprise* (ISE).

Jenis lembaga ini didirikan dari modal (berupa barang atau uang) yang dikumpulkan melalui infak dan sedekah. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya sendiri. *Islamic Social Enterprise* (ISE) yang begitu kreatif dan lebih menarik, namun masih jauh dari cukup. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pemberdayaan masyarakat ini didasarkan atas keadaan sosial di masyarakat namun hal itu tidak menjalin terjadi sebuah pemberdayaan masyarakat dan kemandirian secara berkelanjutan. Hal itulah yang akhirnya muncul istilah *Islamic Social Enterprise* (ISE) dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan alasan dan tujuan yang kuat. Dengan modal pemberdayaan masyarakat berupa dana sosial dengan menawarkan konsep bahwa dana donasi yang didapatkan tidak langsung untuk didistribusikan namun dikelola terlebih dahulu dalam bentuk bisnis sehingga bisa menjamin keberlangsungan program sehingga bisa membuat sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat lebih mandiri dan tidak mengandalkan dana donasi yang didapatkan suatu individu maupun kelompok masyarakat.

Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) merupakan sebuah Yayasan yang didirikan atas dasar aspek pemeliharaan ukhuwah Islamiyah secara luas, demi usaha – usaha dalam mencapai haji yang mabrur, pemanfaatan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat, menggerakkan thalabul ilmi dan amal, pelopor kerja – kerja kolektif dan amal jariyah serta tidak adanya campur tangan urusan politik dengan menitik beratkan pada persoalan kerohanian. Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Yayasan yang lahir atas keinginan untuk menjadi haji yang mabrur pada tahun 1952 sebanyak 31 orang jamaah Haji mencetuskan ide

untuk membentuk sebuah perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan jamaah Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait bagaimana Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) ini bisa mengelola dana filantropi secara produktif bukan konsumtif dalam proses pemberdayaan masyarakat bagi jama'ah pada Yayasan PDHI ataupun bagi masyarakat umum. Penelitian ini sangat penting dilakukan pada Yayasan PDHI yang merupakan sebuah Yayasan yang usianya sudah cukup lama. Perkembangan Yayasan PDHI dan eksistensinya yang terus meningkat sehingga menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengkajinya berdasarkan perspektif pengelolaan dana filantropi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui program – program kegiatan yang telah direalisasikan oleh PDHI dalam berbagai bidang sosial maupun ekonomi menggunakan dana filantropi produktif atau konsumtif. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ingin menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) dalam melaksanakan berbagai program kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pada Yayasan PDHI Yogyakarta.

## **B. Kajian Literatur**

### ***Islamic Social Enterprise (SE)***

Secara umum, SE dapat didefinisikan terutama sebagai tujuan sosial di mana surplusnya terutama diinvestasikan kembali untuk tujuan tersebut dalam bisnis atau masyarakat, daripada didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti di sektor swasta (Spear, Cornforth & Aiken, 2009; Kantor Kabinet, 2006; Kerlin, 2006; DTI, 2002). *Islamic Social Enterprise* adalah sebuah entitas berbasis Islam yang memperoleh (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber Amal Islam (melalui wakaf, sedekah hibah dan qardh) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam waktu yang lama (Mohd Abid Boulven, dkk 2018).

*Islamic Social Enterprise* merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menghimpun zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan memenuhi kriteria wirausaha sosial mengadopsi pendekatan kewirausahaan, mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan pendapatan, mencapai misi sosialnya dan menciptakan multiplier effect yang besar tetapi distribusi keuntungan terbatas (Sri Rahayu H, 2019). ISE mempekerjakan pekerja dengan upah minimum untuk menjalankan kegiatan usahanya yang juga menjadi bagian dari kontribusinya dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Dalam hal perbedaan antara SE dan ISE, diyakini bahwa ISE beroperasi dengan tambahan prinsip dan nilai Islam dibandingkan dengan SE. Ada tiga konsep Islam penting yang erat kaitannya dalam setiap organisasi Islam termasuk ISE, yaitu: (i)al-falah (sukses dunia dan akhirat); (ii)masalah (kepentingan umum); dan (iii)maqasid syariah (tujuan Islam). Dalam hal ini, tujuan utama setiap organisasi Islam termasuk ISE adalah untuk mencapainya al-falah.

Istiyani (2020) mengkaji proses pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung melalui pengembangan desa wisata termasuk bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Hasil dari analisis yang dilaksanakan di temukan bahwa beberapa kegiatan di desa dapat mendukung pengembangan desa wisata di Desa Sukawening, antara lain beternak kelinci, budidaya edamame, sandal, dan kegiatan budaya yang dikelola oleh tim Sarapala. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berimplikasi pada ketahanan budaya daerah berupa penguatan budaya khususnya panahan dan beberapa perubahan nilai sosial dan lingkungan.

Mohiuddin (2017) menganalisis bagaimana Islamic Social Enterprise (ISE) dapat berkontribusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor ketiga. Temuan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh harus menyediakan lingkungan hukum dan peraturan yang terpisah untuk perusahaan sosial yang berbasis islam untuk tumbuh dalam ukuran dan skala. Selain itu, kertas itu datang dengan tiga tema yang dapat memberikan pedoman penting bagi Islam Bangladesh perusahaan sosial untuk meningkatkan operasi dan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) adalah sebuah entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam (Kamaruddin dan Auzair, 2018).

## **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Purbathin, 2010). Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwah*, Prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan derajat antar umat manusia.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aras sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Dalam sebuah makalah yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi” Hutomo, Mardi Yatmo (2000). Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (1982), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat

bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri.

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dengan desain penelitian berbasis *grounded theory* yang digunakan untuk mendapatkan teori umum dari sebuah proses, tindakan, atau interaksi dari sudut pandang subjek penelitian (Merlyn Mourah Karuntu, 2022). Dengan desain ini peneliti berusaha mendapatkan pandangan baru terkait dengan sistem pengelolaan Yayasan PDHI yang sesuai dengan prinsip organisasi saat ini yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam, menguraikan fenomena yang ada pada program Pemberdayaan Masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE). Untuk dapat memberikan gambaran pada Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.

Obyek dari penelitian ini sendiri yaitu program pemberdayaan masyarakat di Yayasan PDHI Yogyakarta, Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512 terkait dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat *Islamic Social Enterprise* (ISE) terhadap beberapa lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI Yogyakarta di bidang sosial maupun ekonomi. Subjek penelitian merupakan sumber data dari beberapa lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian yaitu *purposive sampling* dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Peneliti mengambil sebanyak 6 sampel dari banyaknya lembaga yang ada di bawah Yayasan PDHI Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN	TEMPAT
1	Pengurus Yayasan PDHI	Sekretaris Umum	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
		Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
2	Pendidikan	MA dan MTS Ibnu'l Qoyyim Bantul (PPIQ Putri)	Jl. Gandu, RT.05/RW.08, Gandu, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573
3	Sosial	Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI	Klaci I, Margoluweh Kec. Seyegan Kab. Sleman DIY

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN	TEMPAT
4	Dakwah	Islamic Centre Playen, Gunungkidul	Jl. Playen Paliyan, Banaran, Playen, Kec. Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
		Islam Centre Cangkringan Sleman (TK RA PDHI)	Kompleks Perum Wirokerten, Jogoragan, Banguntapan, Balong Lor, Potorono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55196

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif dan teknik non interaktif. Dimana teknik interaktif dilakukan melalui wawancara, sedangkan teknik non interaktif dilakukan melalui dokumentasi. Tahapan dalam analisis penelitian ini adalah pengumpulan data (*Data Collection*) Data dikumpulkan dari metode yang digunakan yaitu wawancara dan juga berlari, display data (*Data Display*) melalui Penyajian data ini, data akan lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2013), kondensasi data (*Data Condensation*) Kondensasi atau pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan/atau mengganti data yang muncul dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lain, sehingga data menjadi lebih padat, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Adanya peran *Islamic Social Enterprise* (ISE) yang memiliki peran fungsional untuk menghasilkan kekayaan untuk tujuan masyarakat, baik dalam bentuk independen kecil ataupun sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam proses pengelolaan dana filantropi. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu membentuk sebuah keahlian yang mampu memenuhi kebutuhan menawarkan baik berupa barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya usahanya. Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) menyampaikan bahwa:

*“...Yayasan ini ada berkat adanya keluhan dari beberapa jamaah haji di daerah Yogyakarta terutama daerah Bantul saat itu, begitu pula dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diawali dengan adanya keluhan yang dirasakan masyarakat yang disampaikan ketika kegiatan pengajian rutin Yayasan PDHI ini. Sehingga secara tidak langsung banyaknya jamaah Yayasan PDHI ini dimulai dari kegiatan dakwah.”*

Dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga diawali dengan sebuah pengajian rutin di masyarakat yang diadakan oleh jamaah Haji di daerah Yogyakarta. Diawali dengan kegiatan dakwah semua pemberdayaan masyarakat didasarkan atas rasa taqwa dan ukhuwah islamiyah yang sangat kuat. Yayasan PDHI menyelenggarakan kegiatan dakwah guna menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat Yayasan PDHI juga memiliki beberapa step mensukseskan pemberdayaan dan juga mewujudkan sistem kemandirian yang ada pada masyarakat. Hal terpenting dari proses pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua departemen pemberdayaan ekonomi di Yayasan PDHI H. M. Arif S.E (2023).

*“...Saat ini di PDHI bisa dikatakan sudah memiliki rencana terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi meskipun memang belum terlaksana 100%, ... Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Yayasan PDHI”*

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Yayasan PDHI ini memiliki sebuah sistem pemberdayaan yang sangat unik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem kemandirian pada semua lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini. Hal ini dikarenakan Yayasan PDHI menggunakan istilah otonomi dalam proses pemberdayaan masyarakatnya. Dari semua unit atau lembaga yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini beberapa di antaranya memiliki sebuah profit. Namun, profit yang di dapatkan oleh lembaga yang di bawah naungan Yayasan PDHI ini tidak ada sistem bagi hasil antara Yayasan PDHI dengan pihak lembaga dibawah naungan Yayasan PDHI. Walaupun menurut Karl Marx dalam Mardi (2000), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya.

Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

*“... dalam proses pengelolaan unit – unit usaha atau kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI ini semua diberdayakan secara mandiri melalui usaha yang ataupun donasi yang diperoleh dalam proses kegiatannya, hal ini karena Yayasan PDHI ini menerapkan sistem otonomi untuk seluruh unit*

*– unit kegiatan atau usaha baik dari kegiatan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan ataupun dakwah. “*

Adanya Yayasan PDHI sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat ini membuat terjadinya sebuah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

*“... dalam proses pengelolaan dana donasi yang diperoleh dari kegiatan dakwah Yayasan PDHI berupa kajian rutin untuk jama'ah Yayasan PDHI. Biasanya dana yang dihimpun merupakan dana sedekah dan infaq akan didistribusikan secara langsung kepada pihak atau unit – unit kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI secara langsung.”*

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pengurus Yayasan PDHI merupakan tokoh yang telah berumur. Kegiatan-kegiatan di Yayasan PDHI lebih banyak terfokus pada kajian keislaman normatif, sehingga terjadi kesenjangan dengan generasi muda. Di samping itu, sosialisasi yang masih kurang membuat banyak kalangan, khususnya anak muda kurang merespon keberadaan Yayasan PDHI.

### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan Negara, pemberdayaan masyarakat bukan sekedar konsep ekonomi tetapi secara implisit mengandung arti menjunjung tinggi demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tujuan utamanya adalah:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk selalu mampu dalam berkembang
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik dan sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah tersebut.
- c. Melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

### **Konsep Islamic Social Enterprise**

Definisi ISE sebagai: *“Entitas berbasis Islam yang memperoleh pendanaan (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber amal Islam (melalui wakaf, sadaqah, hibah, dan qard) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk berkontribusi kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam jangka panjang.”*

Terdapat tiga aspek dalam mengkonseptualisasikan ISE dari perspektif Islam yaitu: Tujuan sosial, diyakini bahwa beberapa prinsip dan nilai Islam yang berkaitan dengan tujuan atau kegiatan sosial dapat dimasukkan menjadi tujuan sosial Islam ISE. Ini termasuk ta'awanu alal birri wattaqwa (kerja sama Islam), amar ma'ruf nahi munkar (memerintah

kebaikan dan melarang kejahatan atau dikenal dengan jihad), fastabiqul khairat (bersaing dalam melakukan kebaikan) dan masalah ummah (kepentingan umum) untuk tujuan sosial Islam (Kamaruddin & Auzair, 2018; Mohamed et al., 2016).

*Islamic Social Enterprise* (ISE) sebagai lembaga Islam harus didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam (Ahmad, 1988). Hal ini sesuai dengan prinsip Yayasan PDHI yang selalu mengutamakan ibadah di dalam proses semua kegiatan yang dijalani. Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI adalah pencapaian al-falah, mengikuti tujuan pendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Al-falah dapat diartikan sebagai kesuksesan di dunia dan akhirat. Segala bentuk usaha di dunia ini harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat karena dunia ini (semua perbuatan baik) adalah jembatan menuju kesuksesan di akhirat (Akram Khan, 1994).

*Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI juga terlibat dalam bisnis sosial, dana amal Islam harus dikelola dengan baik dan hati-hati atas dasar kepercayaan. Tindakan moderat ini telah dinyatakan dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan [mereka] adalah orang-orang yang, ketika mereka membelanjakannya, tidak melakukannya secara berlebihan atau hemat, tetapi selalu, di antara itu, [secara adil] sedang-sedang saja” (Al-Furqan 25:67).

### **Maqasid Syariah Dasar Islamic Social Enterprise**

Maqasid syariah atau tujuan hukum Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006). Dalam proses wawancara ibu Dian Rahmawati. S.Pd selaku Kepala RA PDHI Bantul, Yogyakarta menyampaikan bahwa:

“... bentuk adanya Yayasan PDHI Yogyakarta ini memiliki peran penting di masyarakat yaitu adanya sistem *Islamic Social Enterprise* yang diwujudkan dengan bentuk RA PDHI ini yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang sudah dipercaya sejak belasan tahun lama dengan tingkat pendidikan yang baik namun dengan biaya yang bisa dikatakan rendah, bahkan bagi siswa siswi yang menunggak pun tidak akan dikenakan denda ataupun dampak dari hal tersebut dalam proses belajar mengajar, hal ini kembali pada prinsip utama Yayasan PDHI bahwa semua kebaikan ini demi maslahat umat.”

*Islamic Social Enterprise* (ISE) yang terjadi pada Yayasan PDHI ini mampu memberikan pemberdayaan, dengan sistem monitoring melalui sebuah kegiatan yaitu pengajian rutin. Dalam proses ini bukan hanya ada ikatan batin yang terjalin tapi juga membuat ukhuwah islamiyah dan juga silaturahmi yang terjalin dengan baik. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi para jama'ah di Yayasan PDHI ini berupa relasi dan perjalanan perekonomian. Rasa saling menolong dan menghormati merupakan hal yang lahir dari rasa saling menghormati dan rasa kepemilikan yang luar biasa.

### **Kerangka Islamic Social Enterprise (ISE)**

Menurut Yunus dan Weber (2009) *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE). ISE Tipe I menggunakan keuangan mikro Islam yang efisien dan ekstensif Qard Al-Hasan dana melalui ISE harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. ISE Tipe II Lembaga keuangan Islam maupun organisasi amal Islam dapat mengumpulkan dan memanfaatkan secara efisien sumbangan wajib Islam serta sumbangan opsional, seperti, Zakat, Wakaf, Sadaqah Dan dana amal lainnya. Meskipun dana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, namun tidak boleh terbatas pada penyelesaian masalah sosial dan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat dari beberapa tipe lembaga amal sosial Yayasan PDHI ini justru memiliki tipe ke duanya yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe I yang mana bisnis atau usaha akan dilaksanakan oleh sekelompok pengusaha profesional, yang akan membiayai bisnis tersebut, tetapi tidak berhak atas keuntungan apa pun. Tipe II yaitu usaha yang berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri. Hal inilah yang membuat Yayasan PDHI ini memiliki standar Islamic Social Enterprise (ISE) bagi pengelola dana amal di masyarakat dengan tujuan demi kemaslahatan umat tanpa adanya keuntungan yang diambil oleh pihak pemangku kepentingan di Yayasan PDHI Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, konsep pemberdayaan masyarakat pada yayasan PDHI berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini memiliki peran unik yakni memiliki dua peran secara formal dan non formal. Peran formal dengan mendirikan lembaga pendidikan pesantren dan sekolah, sedangkan peran non formal dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin di berbagai wilayah.

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Risdiana (2017), analisis pada Yayasan PDHI “Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia)” menemukan bahwa PDHI cukup aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban, meskipun pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya masih relatif sederhana. Hal ini dibuktikan dengan Yayasan PDHI telah menginisiasi pembangunan masjid di berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan mendirikan pendidikan rumah sakit, pusat Islam dan panti asuhan.

Pada penelitian yang dilakukan ini memiliki sebuah *Maqasid syariah* dalam Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama

ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006).

Hal ini justru berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh M Ikmal Hisyam Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis sebuah tujuan untuk menyajikan model akuntabilitas keuangan Islam yang terintegrasi. Dengan menggunakan ketiga aspek akuntabilitas yaitu: (i) akuntabilitas kepada siapa (kelompok akuntabilitas); (ii) akuntabilitas untuk apa (dimensi akuntabilitas); dan (iii) akuntabilitas tentang bagaimana (alat dan proses akuntabilitas) diintegrasikan ke dalam satu model. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga bisa dikatakan salah satu proses dengan tujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi sosial maupun ekonomi secara mandiri tanpa bergantung terhadap orang lain di sekelilingnya. Sedangkan dari sisi *Islamic Social Enterprise* (ISE) di Yayasan PDHI ini berupa pengelolaan dana filantropi demi kepentingan masalah umat dengan tujuan yang dicapai yaitu falah.

## **E. Kesimpulan**

*Islamic Social Enterprise* (ISE) diyakini harus mengarah pada *al-falah* yang berpedoman pada maqasid syariah. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* ini memiliki peran dengan bentuk kegiatan perekonomian yang mampu menyokong kegiatan sosial di lembaga – lembaga atau mitra yang dimiliki oleh Yayasan PDHI. Yayasan PDHI Yogyakarta memiliki sistem berdayaan secara mandiri terhadap semua mitra atau lembaga yang dinaunginya. Tujuan pemberdayaan masyarakat di PDHI kepada jama'ah yaitu mampu berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan sarana dan prasana, dan kelembagaaan.

Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) Yayasan PDHI sebagai yayasan sosial adalah pencapaian *al-falah* yang didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT. Maqasid syariah digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam jama'ah yang mungkin tidak ada di masa lalu. ISE pada Yayasan PDHI memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan kemandirian, mengentaskan kemiskinan dan memecahkan masalah sosial. *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ini juga memiliki dua tipe jenis yaitu membiayai bisnis yang dilaksanakan tapi tidak berhak atas keuntungannya dan orientasi keuntungan untuk memberdayakan masyarakat miskin secara mandiri

### Referensi

- Alarifi, G., & Alrubaishi, D. (2018). The social entrepreneurship landscape in Saudi Arabia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(4), 2686.
- Alwi, M.A., M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 99–116. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.25>
- Ashraf, M. A. (2019). Theory of islamic entrepreneurship: A conceptual paper. *International Journal of Entrepreneurship*, 23(3).
- Boulven, M. A., Abdullah, S., Bahari, A., Ramli, A. J., Hussin, N. S., Jamaluddin, J., & Ahmad, Z. (2018). Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 150, 10–13. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>
- Dewi, Ika nurani, Ida Royani, Sumarjan Sumarjan, and Husnul Jannah, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting’, *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2.1 (2020), 12–18 <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Fairizta, Yunia Arien, Suharno Suharno, and Nurul Anwar, ‘Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11 (2020), 1207
- Hadiyanto Abdul Rachim, Dudi Dudi, and Meilanny Budiarti Santoso, ‘Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus’, *Share : Social Work Journal*, 8.2 (2019), 150 <<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>>.
- Kamaruddin, MIH, & Auzair, SM (2018). Klasifikasi Islamic Social Enterprises (ISE) di Malaysia Berdasarkan Sektor Ekonomi. *Tinjauan Manajemen & Akuntansi*, 17(2), 17 - 42.
- Mohd Adib Boulven and others, ‘Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia’, *MATEC Web of Conferences*, 150 (2018), 10–13 <<https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>>.
- Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., & Nasruddin, N. S. (2018). Positioning Islamic social enterprise (ISE). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(3), 28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>
- Muhamed, Nurul Aini, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, and Nur Syazwani Nasruddin, ‘Positioning Islamic Social Enterprise (ISE)’, *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6.3 (2018), 28 <<https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>>
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib, ‘Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif’, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106–34 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>>.
- Nindatu, Peininan Ireine, ‘Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3.2 (2019), 91–103
- Prasetyawan, A. A., Asep, D., & Rohimat, M. (2019). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship. *Arian Agung P & Asep Maulana R* |, 163, 163–180. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>

- Rachim, H. A., Dudi, D., & Santoso, M. B. (2019). Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>
- Sri Rahayu Hijrah Hati and Aida Idris, 'The Role of Leader vs Organisational Credibility in Islamic Social Enterprise Marketing Communication', *Journal of Islamic Marketing*, 10.4 (2019), 1128–50 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018>>.
- Utama, R. D. R., Fitrandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment?: an Exploratory Study. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 451. <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.451-457>
- Zakariya, N. A. (2021). Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim). *Tesis*.